

RENCANA KERJA AKHIR

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG
JL. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 11 BATANG 51212 Telp. (0285)
391980**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Akhir Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, dan Rancangan Akhir RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 2025. Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Batang, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BATANG

A circular official stamp of the Batang Regency Inspectorate. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG' and the inner ring contains 'INSPEKTORAT DAERAH'. A blue ink signature is written across the stamp.
Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum.CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP: 19641214 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.....	8
1.3.2 Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2023-2026	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	25
2.2.2 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah	30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III	52
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV	62
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
4.1. Program dan Kegiatan.....	62
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10).

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan, dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Di samping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang ini mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Batang. Sedangkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 yang disusun ke dalam rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan

pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tahun-tahun sebelumnya.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang tahun 2025, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menjadi acuan pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2025 serta keterkaitan / tindak lanjutnya terhadap penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- c. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- j. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026
- k. Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

- a. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;
- b. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025

- a. Menterjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPD Kabupaten Batang secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis hasil/kinerja;
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
- e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengawasan yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 menurut Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen perangkat daerah, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2026

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

sampai dengan tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Bagian ini berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2023-2026

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang ditunjang dengan Belanja operasional dan Belanja modal. Total APBD Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp. 12.845.952.090,00, hingga bulan Juni dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasional

Pagu anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 12.612.828.890

b. Belanja Modal

Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 233.123.200

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.845.952.090,00 dengan jumlah program pada DPA sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Sedangkan jumlah program dan kegiatan pada Renstra adalah sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan, jumlah program dan kegiatan pada Renja tahun 2024 adalah sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 kegiatan, sehingga semua program dan kegiatan yang ada pada Renja tahun 2024 dapat terakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2024.

Rincian target dan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan (sesuai DPA) adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi rincian target dan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan (sesuai DPA) hasil pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Batang

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2026	Target dan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Perangkat Tahun 2023	Renja Daerah	Realisasi Perangkat Tahun 2023		Renja Daerah	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100	48.466.131.180,80	8.325.341.662,00	1.507.331.668,00	0,18	8.252.793.694,00	58.226.256.542,80	582.262.565,43
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	100	127.006.400,00	26.048.000,00	4.200.000,00	0,16	25.360.000,00	156.566.400,00	1.565.664,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	30	127.006.400,00	26.048.000,00	4.200.000,00	0,16	25.360.000,00	156.566.400,00	5.218.880,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	100	40.368.829.580,80	6.842.112.212,00	563.297.134,00	0,08	6.364.284.034,00	47.296.410.748,80	472.964.107,49
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	39.813.549.580,80	6.701.705.212,00	550.465.634,00	0,08	6.253.184.034,00	46.617.199.248,80	776.953.320,81

6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	247.480.000,00	49.563.500,00	5.981.500,00	0,12	52.600.000,00	306.031.500,00	25.502.625,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	307.800.000,00	41.280.000,00	6.880.000,00	0,17	58.500.000,00	373.180.000,00	31.098.333,33
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	100	502.000.000,00	103.000.000,00	13.183.614,00	0,13	127.525.000,00	642.708.614,00	6.427.086,14
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	502.000.000,00	103.000.000,00	13.183.614,00	0,13	127.525.000,00	642.708.614,00	53.559.051,17
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan	100	2.125.000.000,00	545.501.250,00	6.348.000,00	0,01	500.000.000,00	2.631.348.000,00	26.313.480,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	40	875.000.000,00	294.998.750,00	5.498.000,00	0,02	250.000.000,00	1.130.498.000,00	28.262.450,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	1.250.000.000,00	250.502.500,00	850.000,00	0,00	250.000.000,00	1.500.850.000,00	37.521.250,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	344.185.800,00	344.185.800,00	47.794.911,00	0,14	482.053.400,00	874.034.111,00	8.740.341,11
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	12	35.661.500,00	7.132.300,00	-	-	15.146.900,00	50.808.400,00	4.234.033,33
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	477.600.000,00	60.048.500,00	21.025.000,00	0,35	100.187.500,00	598.812.500,00	49.901.041,67
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	12	339.225.000,00	100.325.000,00	26.769.911,00	0,27	130.000.000,00	495.994.911,00	41.332.909,25
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Perkantoran	12	189.150.000,00	71.450.000,00	24.238.200,00	0,34	80.159.000,00	293.547.200,00	24.462.266,67

6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	12	9.900.000,00	2.200.000,00	260.000,00	0,12	5.000.000,00	15.160.000,00	1.263.333,33
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	12	400.350.000,00	103.030.000,00	-	-	151.560.000,00	551.910.000,00	45.992.500,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	100	272.799.400,00	272.799.400,00	-	-	13.181.860,00	285.981.260,00	2.859.812,60
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Opranl dan BBM	210	228.480.000,00	272.799.400,00	-	-	13.181.860,00	241.661.860,00	1.150.770,76
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah realisasi penyediaan jasa kantor	100	5.250.000,00	5.250.000,00	96.443.975,00	18,37	234.210.400,00	335.904.375,00	3.359.043,75
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	12	26.250.000,00	5.250.000,00	167.000,00	0,03	10.000.000,00	36.417.000,00	3.034.750,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	12	425.000.000,00	85.000.000,00	20.656.831,00	0,24	100.000.000,00	545.656.831,00	45.471.402,58
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	480.907.500,00	96.195.000,00	15.456.444,00	0,16	124.210.400,00	620.574.344,00	51.714.528,67
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	4.721.060.000,00					4.721.060.000,00	47.210.600,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opanl	210	733.500.000,00	326.000.000,00	10.663.700,00	0,03	205.000.000,00	949.163.700,00	4.519.827,14
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	210	982.560.000,00	265.793.800,00	24.500.000,00	0,09	301.179.000,00	1.308.239.000,00	6.229.709,52
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	1	2.880.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	0,12	-	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00

6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	1	125.000.000,00	201.697.720,00	-	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100	12.579.137.325,00	3.229.377.600,00	512.819.750,00	0,16	2.624.739.300,00	15.716.696.375,00	157.166.963,75
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	100	8.400.382.125,00	2.744.079.150,00	477.438.550,00	0,17	2.242.218.850,00	11.120.039.525,00	111.200.395,25
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Kinerja	100	1.581.762.545,00	311.939.000,00	95.571.900,00	0,31	286.536.000,00	1.963.870.445,00	19.638.704,45
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	100	967.031.380,00	298.313.000,00	-	-	150.872.000,00	1.117.903.380,00	11.179.033,80
6	01	02	2.01	0003	Revu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Kinerja	WTP	1.210.887.600,00	422.735.750,00	139.635.500,00	0,33	337.263.250,00	1.687.786.350,00	WTP
6	01	02	2.01	0004	Revu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	100	450.000.000,00	74.289.500,00	25.645.500,00	0,35	74.019.500,00	549.665.000,00	5.496.650,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	1.349.053.000,00	671.463.000,00	107.681.075,00	0,16	438.618.000,00	1.895.352.075,00	18.953.520,75
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	12	296.078.000,00	298.549.800,00	20.800.000,00	0,07	298.576.000,00	615.454.000,00	51.287.833,33
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	2.545.569.600,00	666.789.100,00	88.104.575,00	0,13	656.334.100,00	3.290.008.275,00	32.900.082,75
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200	4.178.755.200,00	485.298.450,00	35.381.200,00	0,07	382.520.450,00	4.596.656.850,00	22.983.284,25

6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	2.625.336.400,00	81.505.700,00	3.355.700,00	0,04	81.404.450,00	2.710.096.550,00	27.100.965,50
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	1.553.418.800,00	403.792.750,00	32.025.500,00	0,08	301.116.000,00	1.886.560.300,00	18.865.603,00
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	774	1.209.832.800,00	270.929.950,00	48.003.500,00	0,18	339.271.200,00	1.597.107.500,00	2.063.446,38
6	01	03	2.01		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	374	859.832.800,00	170.929.950,00	40.543.000,00	0,24	239.958.200,00	1.140.334.000,00	3.049.021,39
6	01	03	2.01	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	168.287.800,00	42.166.950,00	24.200.000,00	0,57	42.071.950,00	234.559.750,00	2.345.597,50
6	01	03	2.01	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74	185.272.000,00	45.340.500,00	7.460.500,00	0,16	46.318.000,00	239.050.500,00	3.230.412,16
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	506.273.000,00	83.422.500,00	8.882.500,00	0,11	126.568.250,00	641.723.750,00	6.417.237,50
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	75.000.000,00	43.220.000,00	36.545.000,00	0,85	25.000.000,00	136.545.000,00	1.365.450,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	200	350.000.000,00	100.000.000,00	7.460.500,00	0,07	99.313.000,00	456.773.500,00	2.283.867,50

6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	175.000.000,00	50.000.000,00	5.282.000,00	0,11	49.725.000,00	230.007.000,00	2.300.070,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	175.000.000,00	50.000.000,00	6.250.000,00	0,13	49.588.000,00	230.838.000,00	2.308.380,00

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Batang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2026	Target dan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Relaisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	100	100	86	86,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00

6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	25	100	100	87	87,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	25	100	100	87	87,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	100	100	84	84,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Oprsl dan BBM	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00

6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil PengawasanLaporan Kinerja	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	25	100	100	90	0,9	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10).

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
9. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum di atas, sedangkan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat mempunyai fungsi antara lain:

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan public di bidang kesekretariatan;
3. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
4. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan tata usaha;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. Melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
- c. Melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- d. Melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
- g. Melaksanakan probity audit;
- h. Melaksanakan audit investigasi;
- i. Melaksanakan audit forensik;
- j. Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- k. Melaksanakan tindak lanjut kerjasama APIP-APH;
- l. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi Sanksi Daftar Hitam (black list);
- m. Melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, pelaksanaan dan ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan desa melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan serta kegiatan pengawasan lainnya;

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan atas ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;

- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren (pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan);
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi kinerja akhir masa jabatan kepala desa);
- e. Melaksanakan pengawasan (pendampingan) dalam rangka pemeriksaan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
- f. Melaksanakan pendampingan, dan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- g. Melaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten;
- h. Melaksanakan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUAPPAS, dan RKA);
- j. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Binwas Camat terhadap pemerintahan desa;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi kinerja akhir masa jabatan kepala desa);
- c. Melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan reviu Pengadaan Barang Jasa;
- e. Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan audit dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP;
- g. Melaksanakan reviu ASB, dan SSH;
- h. Melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
- i. Melaksanakan audit pengelolaan keuangan desa melalui siswaskeudes

- j. Melaksanakan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial; dan
- k. Melaksanakan stock opname kas dan persediaan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi;

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kinerja keuangan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
- c. Melaksanakan Pemeriksaan kinerja keuangan BUMD Kabupaten;
- d. Melaksanakan Pemeriksaan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Melaksanakan pemeriksaan kinerja pendapatan pajak dan restribusi daerah;
- f. Melaksanakan audit kepatuhan UKPBJ dan pengadaan barang/jasa;
- g. Melaksanakan Pemeriksaan kinerja pada PAUD, SD/SMP dan Pendidikan kesetaraan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan aset daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi pelayanan publik Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- l. Melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- m. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi penyusunan dan verifikasi LHKPN dan LHKASN;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah);
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) ;
- q. Mengkoordinasikan pembangunan budaya integritas;
- r. Mengkoordinasikan peningkatan Kapabilitas APIP;

- s. Mendukung pelaksanaan penilaian zona integritas
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terdiri atas:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Analisis dan Evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 - 1. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
 - 2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa ;
 - 3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - 4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG**



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023, dari 6 (empat) indikator, seluruhnya telah memenuhi target tahun 2024, antara lain: jumlah penyelesaian tindak lanjut LHP sejumlah 94%, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 belum ada pada saat Renja Akhir ini disusun, temuan BPK-RI yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 95%, dan penyelesaian Laporan Reviu sebanyak 37 LHR.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan urusan pengawasan di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pengawasan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dispermades meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas aparat Dispermades melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan daerah;
3. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang dari bawah ke atas;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk lebih jelasnya, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Batang
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

No.	Indikator Kinerja	satuan	Rumus Perhitungan	Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	80	85	85	85	85
2	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	80	85	85	85	85
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Batang	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	80	85	85	85	85
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kinerja Inspektorat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kinerja Inspektorat Daerah	88	88,25	88,5	88,75	85
5	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77	78	79	80	77,8
6	Opini BPK	Skor	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan serta untuk meraih tujuan organisasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan internal meliputi: *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi: *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala).

Melalui metode analisis SWOT, yakni memperhitungkan *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala), Inspektorat Daerah Kabupaten Batang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) serta faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam perencanaan strategis yaitu:

Tabel 2.4
Analisis SWOT
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

<i>Strenght</i> (kekuatan)	<i>Opportunity</i> (peluang)
- Tersedianya SDM (APIP) yang kompeten	- Adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan <i>good and clean government</i> melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah
- Tersedianya anggaran (APBD) untuk pelaksanaan program/kegiatan	- Adanya kerjasama dengan Aparat Penegak hukum (APH)
- Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan	- Tersedianya program aplikasi computer yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas (misal: sinawas, lakone, dll)
- Adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan	- Adanya fasilitasi dan dukungan dari lembaga-lembaga pengawas lainnya, seperti: KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi

terhadap desa dan perangkat daerah	
- Adanya pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	- Adanya tuntutan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Weakness (kelemahan)	Threat (kendala)
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	- Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh APIP
- Masih berorientasi pada penyerapan anggaran (SPJ)	- Adanya regulasi yang kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
- Perlu keberlanjutan <i>system data base</i> yang update dan dapat diandalkan	- Masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di desa dan perangkat daerah karena kurangnya pemahaman perangkat desa dan pengelola keuangan terhadap aturan
- Kurangnya jumlah SDM (APIP dan staf/JFU) yang kompeten	- Belum dibuatnya Pembagian IRBAN per bidang kompetensi
- Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM	
- Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selama kurun waktu 2023, faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang adalah adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah serta pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang dominan adalah adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan *good and clean government* melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah serta adanya fasilitasi dan dukungan dari lembaga-lembaga pengawas lainnya, seperti: KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi.

Namun demikian, isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang diantaranya:

- Kurangnya kapabilitas APIP;
- Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP;

- c. Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh APIP;
- d. Terbatasnya SDM (APIP dan Staf/JFU) yang kompeten.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Guna menghasilkan suatu rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan Akhir penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025. Telaahan terhadap rancangan Akhir penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2025 untuk mengetahui bahwa dalam rancangan tersebut telah sejalan dan selaras dengan arah dan tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 masuk ke dalam tahapan Akhir atau tahapan pertama (Tahun 2025-2026). Adapun prioritas pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Tahun 2023-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip	1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

		reformasi birokrasi	Indikator Sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
--	--	------------------------	--

Sumber: RPD Kab. Batang 2023-2026 dan *Cascading* Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 2023-2026.

Adapun mengenai review terhadap rancangan Akhir RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.507.474.034,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.507.474.034,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.392.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.392.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	51.392.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	51.392.000,00	

			Realisasi Kinerja SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.911.372.034,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.911.372.034,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.800.012.034,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.800.012.034,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.560.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.560.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				134.250.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				134.250.000,00	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	134.250.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	134.250.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				775.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				775.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	525.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	525.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	250.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	250.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				600.312.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				600.312.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.162.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.162.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.550.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.550.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	154.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	154.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.600.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.600.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	Pengadaan Mebel	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.540.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.540.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	160.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	160.000.000,00	

		n, Semua Kel/Desa	Air dan Listrik yang Disediakan				atan, Semua Kel/De sa	dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.540.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.540.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				741.608.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				741.608.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	209.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	209.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	433.008.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	433.008.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.100.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			3.133.012.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			3.133.012.000,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.509.480.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.509.480.000,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	490.012.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	490.012.000,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	373.804.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	373.804.000,00	

							Semua Kel/De sa				
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	484.252.000,00	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	484.252.000,00	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	110.448.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	110.448.000,00	
	Pengawasan Desa	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	131.988.000,00	Pengawasan Desa	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	131.988.000,00	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepaka tan	298.576.000,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Batang , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepaka tan	298.576.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	12 Dokumen	620.400.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kab. Batang , Semua Kecam atan,	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	12 Dokumen	620.400.000,00	

	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kel/Desa	Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			623.532.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			623.532.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	108.080.000,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	108.080.000,00	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	515.452.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	515.452.000,00	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				783.540.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				783.540.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				367.100.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				367.100.000,00	

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	124.500.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	124.500.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	242.600.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	242.600.000,00	
Pendampingan dan Asistensi				416.440.000,00	Pendampingan dan Asistensi				416.440.000,00	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 perangkat daerah	40.000.000,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 perangkat daerah	40.000.000,00	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	101.080.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	101.080.000,00	

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	241.880.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	241.880.000,00	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	33.480.000,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	33.480.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dituntut untuk meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Proses perencanaan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan kegiatan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024, tidak ada Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari Para Pemangku Kepentingan, adapun mekanisme pengusulannya dari Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang karena ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tabel. 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Inspektorat Daerah Kab. Batang
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel Sudah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2025 yaitu Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang diantaranya:

- a. Kurangnya kapabilitas APIP;
- b. Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP;
- c. Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh APIP
- d. Terbatasnya SDM (APIP dan Staf/JFU) yang kompeten.

Dengan adanya isu tersebut maka kami membuat **Sasaran** Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa . Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan.”

Hal ini selaras dengan **Tujuan** Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel .

Tabel 3 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								12.925.535.497, 00				15.470.000.000, 00
6	1				INSPEKTORAT DAERAH								12.925.535.497, 00				15.470.000.000, 00

6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9.008.983.497,00					11.235.000.000,00
6	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								51.392.000,00					45.000.000,00
6	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Laporan	-	51.392.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	45.000.000,00
6	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.861.053.497,00					7.660.000.000,00
6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Orang/bulan	-	6.749.693.497,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	7.500.000.000,00
6	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	52.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00
6	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	58.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00

6	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								134.250.000,00					150.000.000,00
6	1	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	134.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		150.000.000,00
6	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								524.328.000,00					600.000.000,00
6	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Orang	-	274.328.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		300.000.000,00
6	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		300.000.000,00
6	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								600.312.000,00					675.000.000,00
6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	16.162.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		20.000.000,00
6	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	151.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		200.000.000,00

6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	154.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00
6	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	5.000.000,00	Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	273.600.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00
6	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				800.000.000,00
6	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	500.000.000,00
6	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	150.000.000,00
6	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00
6	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								293.540.000,00				405.000.000,00

6	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4.000.000,00	Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00
6	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	160.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00
6	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	129.540.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								544.108.000,00				900.000.000,00
6	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Unit	-	12.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	250.000.000,00
6	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Unit	-	433.008.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	350.000.000,00
6	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000,00
6	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	99.100.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	150.000.000,00

							Dipelihara/Direhabilitasi									Dipelihara/Direhabilitasi		
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							3.133.012.000,00						3.025.000.000,00
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2.509.480.000,00						2.400.000.000,00
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	490.012.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	350.000.000,00
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	373.804.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	250.000.000,00
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	-	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	484.252.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	250.000.000,00
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	-	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	110.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	250.000.000,00
6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	131.988.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	350.000.000,00

6	1	2	02.0 1	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	-	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	1 Kesepakata n	-	298.576.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakata n	300.000.000,00
6	1	2	02.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	620.400.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	650.000.000,00
6	1	2	02.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								623.532.000,00				625.000.000,00
6	1	2	02.0 2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	108.080.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	75.000.000,00
6	1	2	02.0 2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	515.452.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	550.000.000,00
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								783.540.000,00				1.210.000.000,00
6	1	3	02.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								367.100.000,00				120.000.000,00

6	1	3	02.0 1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	12 Rekomend asi	-	124.500.000,00	Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomend asi	60.000.000,00
6	1	3	02.0 1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	1 Rekomend asi	-	242.600.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomend asi	60.000.000,00
6	1	3	02.0 2		Pendampingan dan Asistensi								416.440.000,00				1.090.000.000,00
6	1	3	02.0 2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	42 perangkat daerah	-	40.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 perangkat daerah	50.000.000,00
6	1	3	02.0 2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	42 perangkat daerah	-	101.080.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	450.000.000,00
6	1	3	02.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	12 Kegiatan	-	241.880.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	550.000.000,00
6	1	3	02.0 2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	Kab. Batang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	-	42 perangkat daerah	-	33.480.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	40.000.000,00

TOTAL	12.925.535.497, 00					15.470.000.000
-------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

Sumber : Hasil Analisis Data 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Pengentasan kemiskinan
3. Pencapaian NSPK dan SPM
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada Penetapan Anggaran Tahun 2025 merencanakan 3 program dalam 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yang merupakan urusan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang di bidang pengawasan. serta 2 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.008.983.497,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.392.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	51.392.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.861.053.497,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.749.693.497,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	58.560.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			134.250.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	134.250.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			524.328.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	274.328.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	250.000.000,00

	Peraturan Perundang-Undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			600.312.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.162.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.550.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	154.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	273.600.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			293.540.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.540.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			544.108.000,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	12.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	433.008.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.100.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			3.133.012.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.509.480.000,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	490.012.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	373.804.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	484.252.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	110.448.000,00
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	131.988.000,00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.576.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	620.400.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			623.532.000,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	108.080.000,00

	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	515.452.000,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			783.540.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			367.100.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	124.500.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	242.600.000,00
	Pendampingan dan Asistensi			416.440.000,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 perangkat daerah	40.000.000,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	101.080.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	241.880.000,00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 perangkat daerah	33.480.000,00
Jumlah				12.925.535.497,00

Sumber: SIPD, 2025

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merencanakan total kebutuhan dana sebesar Rp. 12.925.535.497,00 (Dua belas milyar Sembilan ratus dua puluh

lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.2
Rincian RKPD Final Inspektorat Daerah Kab. Batang
Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1.	Belanja Urusan Non Bidang	9.008.983.497,00
2.	Belanja Urusan Pengawasan	3.916.552.000,00
	Total Anggaran	12.925.535.497,00

Sedangkan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah penetapan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel IV.3
Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100 Persen	9.008.983.497	100 Persen	11.235.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	95 Persen	3.133.012.000	95 Persen	3.025.000.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	95 Persen	783.540.000	95 Persen	1.090.000.000
				12.925.535.497,00		15.470.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Akan melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Akan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Batang, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BATANG

Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum.CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19641214 198603 1 009